



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**PROSEDUR
REVISI DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) PADA SATKER BALAI
BESAR/BALAI
SOP/UPM/DJBM-56**

Disahkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

ARIE SETIADI MOERWANTO

Nomor Salinan

Status Dokumen



**PROSEDUR REVISI DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) PADA SATKER BALAI
BESAR/BALAI**

Nomor Dokumen : SOP/UPM/DJBM-56	Tanggal Berlaku : 2 Mei 2017
Nomor Revisi : 00	Halaman : i dari iv

DAFTAR ISI

Daftar isi	i
Sejarah Dokumen	iii
Daftar Distribusi Dokumen dan Notasi	iv
1. Ruang lingkup	1
2. Tujuan	1
3. Acuan	1
4. Definisi	2
4.1 ADK DIPA	2
4.2 Arsip Data Komputer (ADK)	2
4.3 Biaya Operasional	2
4.4 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	2
4.5 DIPA Induk	2
4.6 DIPA Petikan	2
4.7 Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)	3
4.8 Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJBP)	3
4.9 Hasil (<i>Outcome</i>)	3
4.10 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)	3
4.11 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJBP)	3
4.12 Keadaan Kahar	4
4.13 Kegiatan	4
4.14 Keluaran (<i>Output</i>)	4
4.15 Komponen <i>Input</i>	4
4.16 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	4
4.17 Program	5
4.18 Satuan Kerja (Satker)	5
4.19 Sisa Anggaran Kontraktual	5

PROSEDUR REVISI DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) PADA SATKER BALAI BESAR/BALAI

Nomor Dokumen : SOP/UPM/DJBM-56	Tanggal Berlaku : 2 Mei 2017
Nomor Revisi : 00	Halaman : ii dari iv

4.20	Sisa Anggaran Swakelola	5
5.	Ketentuan Umum dan Rincian Prosedur	5
5.1	Ketentuan Umum	5
5.1.1	Ruang Lingkup Revisi Anggaran	5
5.1.2	Batasan Revisi Anggaran	6
5.1.3	Revisi Anggaran Terkait Kebijakan Pemotongan Anggaran, Pengurangan Pinjaman Proyek atau Keadaan Kahar	7
5.1.4	Usulan Revisi Anggaran Terkait Pengurangan Volume Keluaran (<i>Output</i>)	8
5.1.5	Perubahan Anggaran Belanja Yang Bersumber Dari PNB	9
5.1.6	Perubahan Anggaran Belanja Yang Bersumber Dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dan Dalam Negeri	10
5.1.7	Pengajuan Usulan Pengesahan Revisi DIPA Petikan BLU	11
5.1.8	Lampiran Usulan Pengesahan Revisi DIPA Petikan BLU	11
5.1.9	Pengesahan dan Penyampaian Revisi Anggaran	12
5.2	Rincian Prosedur	13
6.	Kondisi Khusus	17
7.	Bagan Alir	18
7.1	Bagan Alir Pemeriksaan & Penelitian Revisi DIPA Berdasarkan Perubahan SP RKA-K/L Pada Satker Tetap Balai/Balai Besar	18
7.2	Bagan Alir Pemeriksaan & Penelitian Revisi DIPA Tanpa Perubahan SP RKA-K/L Pada Satker Tetap Balai/Balai Besar	20
8.	Bukti Kerja	21
9.	Lampiran	21

PROSEDUR REVISI DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) PADA SATKER BALAI
BESAR/BALAI

Nomor Dokumen : SOP/UPM/DJBM-56

Tanggal Berlaku : 2 Mei 2017

Nomor Revisi : 00

Halaman : iii dari iv

SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR REVISI DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) PADA SATKER BALAI BESAR/BALAI

Nomor Dokumen : SOP/UPM/DJBM-56	Tanggal Berlaku : 2 Mei 2017
Nomor Revisi : 00	Halaman : iv dari iv

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN DAN NOTASI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	SET
002	Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan	PJJ
003	Direktorat Pembangunan Jalan	PAJ
004	Direktorat Preservasi Jalan	PEJ
005	Direktorat Jembatan	JEM
006	Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah	JBHFJD
007	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I	BPJN I
008	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II	BBPJN II
009	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III	BPJN III
010	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IV	BPJN IV
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V	BBPJN V
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI	BBPJN VI
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII	BBPJN VII
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII	BBPJN VIII
015	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX	BPJN IX
016	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X	BPJN X
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI	BBPJN XI
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII	BPJN XII
019	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XIII	BBPJN XIII
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV	BPJN XIV
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV	BPJN XV
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVI	BPJN XVI
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVII	BPJN XVII
024	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII	BBPJN XVIII
025	Balai Jembatan Khusus dan Terowongan	BJKT

Catatan :

Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada dibawah koordinasinya.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat